

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400371/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
- Sebesar : Rp. 263.650.000 (DUA RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 263.650.000
Rp. 263.650.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 263.650.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEMATANG SIANTAR (005) Rp. 263.650.000

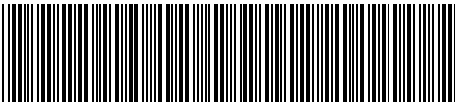
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2026
I A. INFORMASI KINERJA

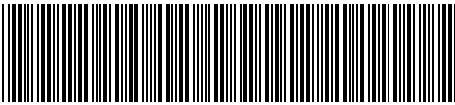


DS:7035-3630-7441-6958

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

			Halaman : I A. 1
Program	: 005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	263.650.000
Kegiatan	: 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	263.650.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
	2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	
	4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	
	5. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	
	6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
	7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
	8. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
	10. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
	11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	12. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	13. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	14. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
	15. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
	16. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
	17. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
	18. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
	19. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	20. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7035-3630-7441-6958

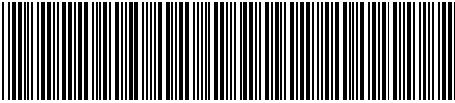
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum									
21. 14		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)							
22. 15		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan			1.500.000
Rincian Output		:	01	AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.00	kegiatan		1.500.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	350,00	Perkara, Berkas Perkara			209.600.000
Rincian Output		:	01	BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	350.00	Perkara		209.600.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	150,00	Orang			48.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	150.00	Orang		48.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	10,00	Perkara, Berkas Perkara			4.550.000
Rincian Output		:	01	QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)	5.00	Perkara		300.000
		:	02	QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan (PN)	5.00	Perkara		4.250.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2026
I B. SUMBER DANA



DS:7035-3630-7441-6958

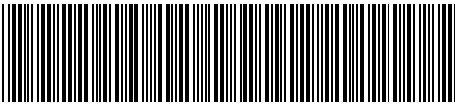
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	263.650.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	263.650.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



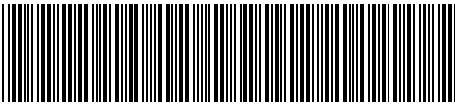
DS:7035-3630-7441-6958

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	-	263.650	-	-	-	263.650	07 . 05	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	263.650	-	-	-	263.650		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	263.650	-	-	-	263.650		
1049.AEA	Koordinasi	-	1.500	-	-	-	1.500		
	(07.05 SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN)								
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	209.600	-	-	-	209.600		
	(07.05 SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN)								
01	RM	-	209.600	-	-	-	209.600		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	48.000	-	-	-	48.000		
	(07.05 SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN)								
01	RM	-	48.000	-	-	-	48.000		
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	4.550	-	-	-	4.550	07 . 05	
	(07.05 SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7035-3630-7441-6958

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Kewenangan : (KD)

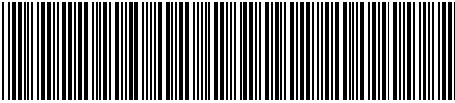
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	4.550	-	-	-	4.550	005	
JUMLAH		-	263.650	-	-	-	263.650		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7035-3630-7441-6958

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

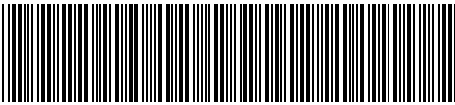
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	22.857	22.857	22.407	22.107	22.107	21.257	21.257	21.257	21.257	21.257	21.257	23.768	263.650
		BELANJA BARANG	22.857	22.857	22.407	22.107	22.107	21.257	21.257	21.257	21.257	21.257	21.257	23.768	263.650
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	22.857	22.857	22.407	22.107	22.107	21.257	21.257	21.257	21.257	21.257	21.257	23.768	263.650
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	22.857	22.857	22.407	22.107	22.107	21.257	21.257	21.257	21.257	21.257	21.257	23.768	263.650
		PERKIRAAN PENERIMAAN	5.235	5.535	5.060	4.450	5.665	5.140	6.045	5.335	5.560	5.610	4.840	5.640	64.115
		- PNBP (425231)	10	10	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40
		- PNBP (425232)	470	400	490	290	610	390	590	430	530	510	320	660	5.690
		- PNBP (425233)	1.335	1.705	1.150	740	1.635	1.330	2.015	1.485	1.610	1.680	1.100	1.550	17.335
		- PNBP (425239)	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.430	41.050

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2026
IV A. B L O K I R



DS:7035-3630-7441-6958

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [400371] PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

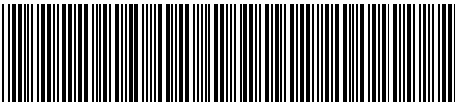
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7035-3630-7441-6958

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [400371] PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN			263.650.000	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			263.650.000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			263.650.000	
1049.AEA	Koordinasi [Base Line] Lokasi : SUMATERA UTARA	2 kegiatan		1.500.000	
1049.AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2 kegiatan		1.500.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			1.500.000	
A	KIMWASMAT			1.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.500.000	
	- Transportasi	10,00 OK	150.000	1.500.000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan [Base Line] Lokasi : SUMATERA UTARA	350 Perkara, Berkas Perkara		209.600.000	
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	350 Perkara, Berkas Perkara		209.600.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			209.600.000	
A	Pendaftaran Berkas Perkara			154.518.000	
521211	Belanja Bahan			3.500.000	
	- Penjilidan berkas Perkara	350,00 PKR	10.000	3.500.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			151.018.000	
	- Box Perkara	1,00 THN	30.436.000	30.436.000	
	- Alat Tulis Kantor	350,00 PKR	344.520	120.582.000	
B	Penetapan Hari Sidang			2.765.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2.765.000	
	- Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	190,00 KEG	14.556	2.765.000	
C	Pegiriman Surat Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan			2.765.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2.765.000	
	- Pengiriman Surat Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan	190,00 KEG	14.556	2.765.000	
D	Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan			19.800.000	
521211	Belanja Bahan			19.800.000	
	- Konsumsi Makan Terdakwa	1.000,00 OK	18.000	18.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Konsumsi Pengamanan Dari Kepolisian	100,00 OK	18.000	1.800.000	
E	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU Dan Terdakwa			2.765.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2.765.000	
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	190,00 KEG	14.556	2.765.000	
F	Minutasi/Upaya Hukum			7.932.000	
521211	Belanja Bahan			7.932.000	
	- Penggandaan Dan Penjilidan Berkas Perkara	350,00 KEG	22.665	7.932.000	
G	Penanganan Pekarara Banding Di Pengadilan Tingkat Pertama			5.821.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			5.821.000	
	- Pengiriman Berkas Banding	100,00 KEG	29.112	2.911.000	
	- Pemberitahuan Proses banding Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	200,00 KEG	9.704	1.940.000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	100,00 KEG	9.704	970.000	
H	Penanganan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di PEngadilan Tingkat Pertama			13.234.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			13.234.000	
	- Pengiriman Proses Kasasi/PK Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	93,00 KEG	32.023	2.978.000	
	- Pengiriman Putusan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Kepada Jaksa/Tedakwa/Penasehat Hukum	90,00 KEG	32.023	2.882.000	
	- Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Dan Peninjauan kembali	95,00 KEG	77.623	7.374.000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] Lokasi : SUMATERA UTARA	150 Orang		48.000.000	
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	150 Orang		48.000.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			48.000.000	
A	Pos Bantuan Hukum			48.000.000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			48.000.000	
	- Honor Advokat/Pengacara Piket	480,00 OJ	100.000	48.000.000	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan [Base Line] Lokasi : SUMATERA UTARA	10 Perkara, Berkas Perkara		4.550.000	
1049.QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	5 Perkara, Berkas Perkara		300.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			300.000	
A	<i>Biaya Perkara</i>			300.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			300.000	
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	5,00 PKR	60.000	300.000	
1049.QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan	5 Perkara, Berkas Perkara		4.250.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			4.250.000	
A	<i>Sidang Di Luar gedung Pengadilan</i>			4.250.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			4.250.000	
	- Uang Transport	5,00 OK	850.000	4.250.000	

Dokumen ini dicetak secara otomatis dari sistem pada tanggal: 02-02-2026 15:23:23